

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Pendidikan merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karena bangsa yang maju tidak hanya bagus dalam pengembangan sumber daya alam (SDA) saja namun perlu pula pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas harus diimbangi dengan kualitas dari pendidikan yang baik. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi manusia untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui proses belajar. Dunia pendidikan merupakan sarana untuk seseorang memperoleh pengetahuan melalui proses pembelajaran, seseorang yang memiliki banyak pengetahuan artinya ia memiliki kualitas diri yang baik. Selain itu dunia pendidikan merupakan wahana untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki keahlian dan keterampilan serta nilai dan norma yang berkualitas untuk dapat menghadapi perkembangan jaman yang semakin maju dan modern.

Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jalur pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal. Hal ini seperti yang tercantum pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Ketiga jalur pendidikan itu kemudian dijelaskan pada UU No 20 Tahun 2003 pasal 1 yaitu :

Ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ayat (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar jalur formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian Ayat (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak hanya melalui jalur pendidikan formal, namun bisa pula melalui jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan salah satu dari ketiga jalur pendidikan Indonesia yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencerdaskan

Rimayanti, 2017

ANALISIS PENYELENGGARAAN PROGRAM DIKLAT PEKERJA SOSIAL (PEKSOS) PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH).

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kehidupan bangsa. Pada dasarnya pendidikan formal dan nonformal memiliki tugas yang sama yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Menurut (Sudjana D. , 2010) Konsep pendidikan nonformal muncul atas dasar hasil observasi dan pengalaman langsung dan atau tidak langsung. Hasil observasi dan pengalaman ini kemudian dibentuk sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan ciri-ciri antara pendidikan nonformal dengan pendidikan formal. Disamping itu pendidikan nonformal memiliki pengertian, sistem, prinsip-prinsip, dan paradigma tersendiri yang relatif berbeda dengan yang digunakan pendidikan formal. Selanjutnya pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu pendidikan nonformal, Menurut Bella dalam (Hasibuan, 2001, hal. 70) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab *why*. Sedangkan pelatihan berorientasi di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya menjawab *how*. Berdasarkan definisi tersebut maka tujuan dari diadakannya program Diklat adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial peserta diklat, dimana hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri dan dapat dipergunakan untuk keperluan pekerjaan peserta diklat.

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial regional II Bandung atau sering dikenal dengan nama BBPPKS Bandung merupakan unit pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 29 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. BBPPKS Bandung bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan Diklat bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pegawai (TKSP), penyiapan dan standarisasi pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi dan koordinasi dengan instansi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BBPPKS Bandung memiliki enam wilayah kerja yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Bangka Belitung.

BBPPKS Bandung menyelenggarakan Diklat untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) diantaranya ialah Diklat Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Diklat Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Diklat Perlindungan Anak dan Manajemen Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan diklat lainnya. Salah satu diklat yang telah dilaksanakan dan dievaluasi kebermanfaatannya ialah Diklat Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistim perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin, ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan MGD atau *Millenium Development Goals* yang banyak digunakan di seluruh dunia pada awal tahun 2007 (BBPPKS Bandung, 2014).

Dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial masalah kemiskinan perlu menjadi prioritas utama, dalam penanganan permasalahan kemiskinan yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional perlu ditangani secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor salah satunya ialah Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan sudah dimulai sejak 2007, dalam program ini bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan, bantuan yang akan diterima oleh RTSM merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) bersifat multisektoral baik di pusat maupun di daerah melibatkan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan hingga Desa serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “ pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka dari itu

amanat UUD tersebut dapat di wujudkan secara empirik dalam pengembangan Program Keluarga Harapan.

Untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) wajib ditunjang dan dimotori oleh tenaga pelaksana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang kompeten dan handal dalam melaksanakan tugas pendampingan RTSM pada tiap-tiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Para tenaga pelaksana tersebut direkrut oleh UPPKH Pusat melalui proses seleksi dan pelatihan. Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut (Yanuar, 2015) Kualifikasi yang harus dimiliki pendamping PKH dalam proses *rekrutment* ialah (1) Pendidikan minimal D3 diutamakan S1 yang memiliki latar belakang pendidikan Kesejahteraan Sosial, Komunikasi, Psikologi, Pendidikan, Kesehatan, Hukum, Agama dan bidang ilmu lainnya. (2) Diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini). (3) Diutamakan memiliki pengalaman dalam kegiatan bidang sosial kemasyarakatan. (4) Dapat mengoperasikan komputer dan internet.

Pendamping PKH merupakan pelaksana PKH di tingkat Kecamatan dimana pendamping memiliki peran sebagai orang yang memiliki suara untuk memperjuangkan hak-hak warga masyarakat RTSM, dikarenakan petugas UPPKH Kabupaten /Kota sangat terbatas maka menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat oleh karena itu keberadaan pendamping PKH amatlah sangat dibutuhkan karena pendamping merupakan pancaindra dari Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun tugas utama dari pendamping PKH berdasarkan pengumuman Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 184/LJS.JS.SV/03/2013 Tentang Rekrutmen Tenaga Ahli, Operator UPPKH Pusat, Operator Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 ialah:

“(1) Melakukan pemutakhiran data. (2) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan. (3) Mengunjungi rumah peserta PKH. (4) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan

pendidikan dan kesehatan. (5) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH. (6) Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan dilokasi pelayanan. (7) Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmen. (8) Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi. (9) Melakukan pencatatan dan pelaporan”

Untuk menunjang keterampilan dan kemampuan pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya maka pendamping PKH perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) agar pendamping dapat meningkatkan kualitas dirinya. Kompetensi yang didapatkan dalam diklat pekerja sosial pendamping program keluarga harapan (PKH) ialah (1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta diklat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (2) Mampu menjadi tenaga pendampingan Program Keluarga Harapan di masyarakat (3) Mampu menjelaskan kebijakan dan program PKH (4) Mampu memberikan bimbingan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Lembaga Administrasi Negara, 2014). BBPPKS Bandung adalah salah satu unit pelaksana Diklat Pekerja Sosial Pendamping PKH.

BBPPKS Bandung dalam menyelenggarakan Diklat pada umumnya melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan manajemen dalam sebuah program. Evaluasi adalah hal yang penting dilakukan dalam pelaksanaan sebuah program dalam menentukan keberhasilan dari program pendidikan dan pelatihan (Diklat). Menurut Tyler dalam (Arikunto, 2015) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan. Evaluasi terhadap pendidikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis dan *continue*. Dengan adanya evaluasi maka akan diperoleh gambaran yang terjadi pada waktu tersebut dan untuk selanjutnya perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan hal-hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar.

Berhasil tidaknya program kegiatan pendidikan dan pelatihan akan banyak bergantung pada kegiatan evaluasi yang dilakukan.

Banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi salah satunya ialah *logic model*. Menurut Bickman (1987) dalam (Salsabila, 2013) menyatakan bahwa:

Model *Logic* adalah penyajian secara visual suatu metode yang masuk akal tentang bagaimana sebuah program bekerja di bawah kondisi tertentu untuk memecahkan berbagai masalah yang diidentifikasi dan merupakan dasar untuk evaluasi program (*A logic model is a visual representation of a plausible and sensible method of how a program will work under certain conditions to solve identified problems and is fundamental to program evaluation*).

Maka dari itu *Logic Model* merupakan alat atau kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi sumberdaya, kegiatan, keluaran, pelanggan, hasil dan dampak dari suatu program yang disajikan secara visual. Pada dasarnya semua model evaluasi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menilai keberhasilan program dan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang program yang telah dilaksanakan. *Logic Model* yang dikembangkan oleh (Saludung, 2010) dalam penelitiannya, dimana komponen *logic model* yang dikembangkan terdiri atas enam yakni *situation, input, activities, outputs, outcomes, dan external factor*.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di BBPPKS Bandung pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Peksos Pendamping PKH yang pernah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan 18 Angkatan yang terdiri dari 660 peserta yang berasal dari enam wilayah kerja BBPPKS Bandung, kemudian pada pertengahan 2015 dilakukan evaluasi manfaat tentang penyelenggaraan Diklat tersebut kepada alumni Diklat pendamping PKH tahun 2014. Kegiatan evaluasi manfaat dilaksanakan oleh bidang program dan evaluasi pada seksi pemantauan dan evaluasi. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan dalam Diklat pendamping PKH meliputi evaluasi widyaiswara, evaluasi penyelenggaraan, evaluasi pembelajaran dan evaluasi kebermanfaatannya. Evaluasi widyaiswara dilakukan setelah selesai pembelajaran di kelas, evaluasi pembelajaran meliputi pre tes dan post tes, evaluasi penyelenggaraan dilakukan setelah kegiatan penyelenggaraan diklat selesai, sedangkan evaluasi manfaat

berupa monev (monitoring dan evaluasi) yang dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah dilaksanakan diklat.

Dari semua penyelenggaraan evaluasi yang dilakukan oleh BBPPKS Bandung tentunya terdapat beberapa kelebihan serta kekurangannya, kurang efektifnya waktu pelaksanaan evaluasi, aspek yang dievaluasi, serta ketepatan responden. Beberapa hal tersebut menjadi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan evaluasi diklat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta dalam pelaksanaan evaluasi diklat PKH, maka dapat diasumsikan bahwa penelitian tentang “Analisis Penyelenggaraan Program Diklat Pekerja Sosial (PEKSOS) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).” ini penting untuk dilakukan.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Program Diklat Peksos Pendamping PKH merupakan program *top down* dari Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, yang cenderung sudah memiliki pedoman pelaksanaan dari pemerintah. Namun pada pelaksanaannya seringkali program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pendamping PKH yang berada di wilayah binaan BBPPKS Bandung sehingga diperlukan penyesuaian dengan karakteristik pendamping PKH di wilayah kerja BBPPKS Bandung.
2. Pengelolaan Program Diklat Pendamping PKH yang kurang optimal dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang mengorganisir penyelenggaraan diklat.
3. Evaluasi Program Diklat Peksos Pendamping PKH tidak memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program diklat dikarenakan terjadi *double* evaluasi yaitu evaluasi manfaat yang dilakukan oleh BBPPKS dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial itu sendiri.
4. Instrumen evaluasi yang BBPPKS gunakan dalam pelaksanaan evaluasi pada penyelenggaraan Program Diklat Peksos Pendamping PKH disamakan

instrumennya dengan diklat lain yang BBPPKS selenggarakan sehingga capaian hasil dari masing-masing diklat tidak tergambar jelas.

5. Tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi Program Diklat Peksos Pendamping PKH tidak terlihat sehingga tidak menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dari program diklat pendamping PKH.

Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang diuraikan di atas, tampaklah bahwa masalah yang ada kaitannya dengan tema penelitian cukup luas. Oleh karena itu, peneliti fokus terhadap masalah terkait dengan penyelenggaraan Program Diklat Peksos Pendamping PKH. Sehingga yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada lingkup Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan peksos pendamping PKH menggunakan evaluasi *logic model*.

Atas dasar latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana langkah-langkah evaluasi program diklat peksos pendamping PKH menggunakan *logic model* ?
2. Bagaimana tindak lanjut hasil evaluasi program diklat peksos pendamping PKH?

C. Tujuan Penelitian.

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan :

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah evaluasi program diklat peksos pendamping PKH menggunakan *logic model* ?
2. Untuk mendeskripsikan Tindak lanjut hasil evaluasi program diklat peksos pendamping PKH ?

D. Manfaat Penelitaian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan kepada peserta diklat, sebagai referensi lembaga pendidikan luar sekolah dalam mengembangkan model evaluasi pada program yang diselenggarakan di lembaga pendidikan luar sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah Pengetahuan dan wawasan dalam pengaplikasian teori yang telah diperoleh dan pengalaman dalam mengaplikasikan teori di lapangan.

b. Bagi Penyelenggara diklat BBPPKS Regional II Bandung

Menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan diklat.

c. Bagi Peserta diklat

Menambah pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan kompetensi pekerja sosial pendamping PKH.

E. Struktur Penulisan.

Adapun struktur organisasi penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar isi skripsi hingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdapat struktur bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta Struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini peneliti membandingkan, mengkontraskan, dan memosisikan kedudukan masing-masing penelitian yang di uji dengan mengaitkan pada permasalahan penelitiannya, peneliti menjelaskan posisi yang disertai dengan alasan yang logis. Pada bab ini dimaksudkan untuk memampilkan “mengapa dan bagaimana” serta teori dan hasil penelitian para pakar terdahulu di terapkan oleh peneliti dalam penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang alur penelitian dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang digunakan, hingga langkah – langkah analisis yang dijalankan.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Rimayanti, 2017

ANALISIS PENYELENGGARAAN PROGRAM DIKLAT PEKERJA SOSIAL (PEKSOS) PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH).

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagian ini membahas 1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan 2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi, yang merupakan penjelasan akhir dari penelitian.